



Warga Boleh Memanfaatkan Kembali

160 Ton Limbah APK Tersimpan
di Gudang Bawaslu dan Satpol PP



JOGJA - Potensi alat peraga kampanye (APK) sebanyak 160 ton pasca Pemilu 2024, masih tertumpuk di gudang Bawaslu DIJ maupun Satpol PP setempat. Seluruh limbah APK tidak semuanya dikirim ke TPST Tamanmartani Sleman, karena keterbatasan kuota per hari. Warga diperbolehkan memanfaatkan kembali jika membutuhkan atau untuk daur ulang ■ *Baca Warga... Hal 7*



LIMBAH APK: Personel Satpol PP Kota Jogja memindahkan alat peraga kampanye (APK) sesuai dilakukan penertiban saat masa tenang Pemilu 2024 di gudang Satpol PP Kota Jogja, Jalan Rejowinangun (12/2).
GUNTUR AGA TIRTANA/RADAR JOGJA

Warga Boleh Memanfaatkan Kembali

Sambungan dari hal 1 Tamanmartani.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIJ Kusno Wibowo mengatakan, untuk penanganan APK masih sama koordinasi akhir dengan DLH kabupaten/kota. Di mana sampah APK yang saat dibersihkan selama masa tenang pemilu 11-13 Februari itu masih berada di gudang-gudang Bawaslu.

"Mereka *kan* punya gudang di kabupaten/kota. Sebagian masih ada di situ dan lainnya di gudang Satpol PP. Untuk penanganannya seperti yang lalu (didaur ulang)," katanya kemarin (19/2).

Kusno menjelaskan limbah APK yang didaur ulang ada potensi kemudian bisa dipakai ulang. Atau bisa diolah menjadi bahan bakar refuse derived fuel (RDF) di TPST Tamanmartani Sleman.

Namun ternyata untuk limbah APK yang berpotensi masuk ke sana masih koordinasi lanjutan dengan Bawaslu, KPU, dan DLH kabupaten/kota setempat. Ini utamanya terkait kuota sampah yang bisa masuk ke TPST

"Iya belum tentu semuanya dibuang ke Sleman, karena di sana *kan* kapasitasnya terbatas, hanya 15 ton per hari. Nanti butuh koordinasi dengan DLH Sleman juga," ujarnya.

Menurutnya, sampah APK yang tersimpan dalam gudang Bawaslu dan Satpol PP kabupaten/kota itu merupakan hasil penertiban selama masa tenang. APK yang tidak ditertibkan secara mandiri oleh peserta pemilu dan dibersihkan oleh petugas Satpol PP berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu.

"Kami perkirakan tidak akan bertambah lagi dari prediksi kami yang sekitar 160 ton itu. Karena *kan* sudah kita estimasikan seluruhnya," jelasnya.

Kendati begitu, pada prinsipnya limbah APK yang masih tersimpan di gudang-gudang itu boleh dimanfaatkan oleh warga jika ada yang meminta dan membutuhkan. Baik untuk *reuse* atau dipergunakan kembali. Namun, warga harus bersurat dulu ke kabupaten/kota.

"Harus bersurat *kan* butuh administrasi ya, kemudian

teman-teman dikirim ke Tamanmartani dan lain-lain. Tapi nggak terlalu prosedural sekali. Bisa pakai untuk jemur gabah dan nutup kandang. Prinsipnya diperbolehkan, *kan* digunakan kembali," terangnya.

Terpisah, Sekretaris 1 DPD Partai Demokrat DIJ Fitriah Rahmawati mengatakan hal senada. Ada sekitar 10 ribuan limbah APK se-DIJ dari Partai Demokrat. Soal limbah ini diserahkan kewenangannya di sekretariat, ada yang dimanfaatkan oleh warga sekitar atau diambil oleh vendor pemusnahan APK.

"Boleh sekali (dimanfaatkan warga). Warga biasanya datang minta baliho-baliho bekas untuk dipergunakan pemanfaatan lain," katanya. APK itu ada yang dipasang sendiri oleh DPD atau tim eksternal Demokrat DIJ, milik inventaris partai atau pribadi calon legislatif.

Adapun jenis-jenis alat partai yang masih baik kondisinya seperti bendera-bendera partai akan disimpan untuk inventaris kantor. Dan yang tidak layak akan dimusnahkan. (**wia/laz/hep/by**)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005